

10

**MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN NASIONAL YANG
MERATA, BERKUALITAS DAN RELEVAN:**

Pengembangan kurikulum Sentralisasi dan Desentralisasi

Oleh:
Alwen Benti
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

Disampaikan dalam Focus Group Discussion
Kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang
Dengan
Lembaga Pengkajian MPR RI
Padang, 7 September 2017

PENDAHULUAN

Dalam pengembangan sumber daya manusia skala prioritas dan pilar utama dalam pembangunan nasional adalah melalui sistem pendidikan nasional, seperti yang digariskan secara tegas dan komprehensif dalam Undang-undang SPN Nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kegagalan maupun keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh faktor-faktor determinan dalam pendidikan, yaitu komponen-komponen pendidikan. Salah satu komponen pokok dan mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Berkaitan dengan posisi atau kedudukan kurikulum dalam pendidikan, Nana Syaodih Sukmadinata (2008:3), mengemukakan bahwa: "kurikulum merupakan syarat yang absolut (mutlak) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan". Ini berarti bahwa kurikulum yang dikembangkan perlu menjadi fokus perhatian yang serius dan didisain secara sungguh-sungguh dan matang agar mempunyai relevansi yang signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mohammad Ansyar (1988:17), bahwa "kurikulum merupakan cetak biru pendidikan, dan pada hakekatnya adalah "rohnya" pendidikan berupa sebuah program yang didisain dengan baik berisi pengalaman belajar yang dibutuhkan dan yang perlu dimiliki oleh anak dalam rangka mencapai kompetensi hidup, baik bagi tujuan individu, masyarakat dan bangsa. Mendisain kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi seyogyanya dilakukan berdasarkan teori dan strategi pengelolaannya yang sudah dikonseptualisasikan dan dilaksanakan secara teliti dan hati-hati, serta berdasarkan penelitian yang mendalam agar reformasi dan inovasi tidak sia-sia atau bahkan menimbulkan masalah baru yang cukup mendasar untuk dipecahkan di kemudian hari. Selain itu, kebijakan para pengelola pendidikan tentang pengelolaan pendidikan dan kurikulum yang bersifat sentralistik tidak lagi tepat dan populer digunakan. Beberapa tahun terakhir seiring dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi di bidang pendidikan berubah menjadi desentralistik. Kondisi demikian, sebagai implementasi dari Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang secara substantif memberikan peluang bahkan kewenangan kepada daerah, dan kepada institusi pendidikan untuk menetapkan sendiri kebijakan-kebijakan pendidikannya termasuk yang berkenaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran secara proporsional. Walaupun daerah dan institusi pendidikan memiliki peluang dan diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan dan membuat keputusan tentang kurikulum, seperti kurikulum muatan lokal sebagai wujud kearifan

terhadap potensi lokal, maka standar nasional pendidikan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tetap menjadi pedoman dan acuan pokok.

Muatan lokal dalam kurikulum pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa Indonesia memiliki beraneka ragam potensi dan kondisi, seperti keragaman kondisi alam dan kondisi sosial-budaya yang berbinekha tunggal ika. Selanjutnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang karakteristik dan kekhususan yang ada di lingkungannya. Berkaitan dengan ini, Mannheim (1954:74), menegaskan bahwa "apa yang dipelajari peserta didik hendaknya hal-hal yang juga terdapat di lingkungan sekitarnya". Pemikiran tersebut menggambarkan pentingnya peserta didik mengenal dan memahami lingkungannya, seperti yang ditegaskan oleh Depdikbud (1987:4), bahwa "kurikulum muatan lokal pada dasarnya membentuk peserta didik menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri". Pendapat di atas, memberikan makna bahwa pengenalan dan pemberian pemahaman kepada peserta didik terhadap lingkungannya amat penting, bahkan harus dilakukan sehingga pada gilirannya mereka memiliki "kearifan lokal". Pengenalan dan pemahaman keadaan dan potensi lingkungan alam, sosial dan budaya kepada bangsa Indonesia harus dimulai sedini mungkin pada usia pra-sekolah sampai ke perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, diharapkan pemerintah menghidupkan secara sepenuh hati semangat sentralistik menuju desentralistik. Pertanyaan muncul, seperti; apa itu sentralistik dan desentralistik; mengapa perlu sentralistik menuju desentralistik; bagaimana pelaksanaannya dan beberapa pertanyaan lainnya yang dapat dimunculkan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab melalui bahasan berikut ini.

DARI SENTRALISTIK MENUJU DESENTRALISTIK

Pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan dan pengelolaan yang bersifat sentralistik menekankan kepada penyeragaman dokumen kurikulum maupun implementasinya. Zais (1976:447-448), menamakan pengembangan kurikulum seperti itu dengan *The administrative model*. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, dalam pengembangannya inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Selanjutnya, pihak pemerintah melalui birokrasinya menetapkan berlakunya kurikulum tersebut dan memerintahkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut. Model pengembangan kurikulum tersebut merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal dalam dunia pendidikan di berbagai Negara. Berkaitan dengan itu, H.A.R Tilaar (2002:30-31), menyebutnya dengan model pengembangan kurikulum satu arah (model linier). Model linier ini bermuara dari pemerintah pusat dan mengalir ke daerah. Dalam pengembangannya model ini tidak berakar kepada kebutuhan daerah karena ditentukan oleh satu kekuasaan yang terpusat. Segala sesuatunya diatur secara uniform, setiap

perubahan atau perbedaan dalam implementasinya dianggap suatu kesalahan atau penyelewengan yang tidak dapat ditolerir. Model pengembangan kurikulum ini, cukup lama berlangsung di Indonesia sebagai konsekuensi logis dari sistem pendidikan yang sentralistik, tepatnya selama masa pemerintahan orde baru.

Mencermati model pengembangan kurikulum dalam pengelolaan pendidikan yang menganut sentralistik seperti yang dikemukakan oleh kedua pakar di atas, kelihatannya mengandung kelebihan dan kekurangan. Dilihat sebagai sebuah produk, kelebihannya adalah: (1) model ini disusun dan dikembangkan oleh tim dan para ahli yang berpengalaman dan pejabat yang berkompeten; (2) keseragaman kurikulum akan memudahkan monitoring dan penilaian untuk melihat keberhasilannya secara nasional. Sedangkan kelemahannya adalah: (1) pengembangan kurikulum seperti ini, tidak selalu segera berjalan dengan lancar, sebab menuntut kesiapan dan persiapan yang matang dari pelaksanaannya, terutama guru-guru dan pihak-pihak yang terkait dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Mereka perlu mendapatkan petunjuk-petunjuk dan penjelasan bahkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sehingga kebutuhan akan adanya penataran sering tidak dapat dihindarkan; (2) memerlukan biaya yang cukup besar untuk uji coba, untuk monitoring dan evaluasi serta untuk pengawasan; (3) akan mematikan kreatifitas, inovasi dan produktifitas pribadi, masyarakat maupun daerah; (4) masyarakat semakin lama semakin jauh dan semakin terlempar dari kebudayaan dan lingkungannya, sehingga peranan keluarga, masyarakat terlepas dari praksis pendidikan; (5) kurikulum menjadi semata-mata alat kekuasaan oleh birokrat atau dipolitisasi oleh golongan elit; (6) masyarakat dan daerah bukannya menjadi berdaya tetapi diperdayakan oleh sistem otoriter kekuasaan.

Mencermati kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh model pengembangan kurikulum dalam pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik tersebut, penulis berpendapat bahwa kelemahan-kelemahannya sangat dominan dan berdampak sangat kompleks dalam dunia pendidikan. Sentralisasi pengelolaan pendidikan yang selama ini diterapkan telah menyebabkan kemampuan daerah dalam mengurus pendidikan kurang berkembang sehingga menjadi kendala bagi mutu pendidikan nasional. Pendapat ini, memberi isyarat bahwa model pengembangan kurikulum yang berpijak pada sistem sentralistik tidak tepat dan tidak layak lagi mendapat tempat untuk berkembang dan dikembangkan seiring dengan tuntutan reformasi yang melanda kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak dimulainya masa reformasi.

Salah satu, implikasi dari tuntutan reformasi adalah lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua Undang-undang ini pada hakekatnya adalah berisi desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah

untuk memberikan pelayanan umum dalam kerangka menyelenggarakan Otonomi Daerah. Salah satu pelayanan umum pemerintah daerah kepada masyarakat adalah bidang pendidikan, sehingga muncul kebijakan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan menurut Soemarto dan Akdon (2004), merupakan pendelegasian wewenang penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Situasi seperti ini akan membawa dampak pada penataan sistem pendidikan (organisasi penyelenggara, kurikulum, penataan sumberdaya manusia, pendanaan, sistem pengelolaan sarana dan prasarana) di daerah. Sungguhpun demikian, desentralisasi pendidikan ini tidak berarti menciutkan substansi pendidikan menjadi bersifat lokal dan sempit serta akan menjadikan orientasi pendidikan bersifat primordial yang dapat menumbuhkan sentimen kedaerahan. Karena harus tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Bertolak dari uraian tentang desentralisasi pendidikan, model pengembangan kurikulum yang relevan dengan karakteristik desentralisasi pendidikan adalah yang bersifat "bottom-up". Zais (1976:448-451), menamakan dengan *The Grass Roots Model dan The Demonstration Model*. Seperti dikemukakan sebelumnya, pada padasarnya model pengembangan ini merupakan "lawan" dari model *administrative* atau model linear. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru, sekolah maupun daerah. Lebih jauh Zais (1976), menjabarkan bahwa *grass roots dan demonstration* mungkin hanya berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu, tetapi mungkin pula dapat digunakan untuk bidang studi sejenis pada sekolah lain, atau keseluruhan bidang studi pada sekolah atau pada satu daerah. Pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi ini, memungkinkan terjadinya kompetisi di dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan di daerah, yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia yang lebih mandiri, kreatif, inovatif dan produktif dan memiliki kearifan lokal. Model ini berpotensi untuk menghindari ketidaksesuaian program dengan situasi dan kondisi lapangan atau kondisi daerah, karena upaya pengembangan kurikulum berasal dari pihak yang merasakan, mengalami dan memahami langsung keadaan dan kebutuhan lapangan atau kebutuhan daerah, sehingga masalah relevansi dalam pendidikan dapat dipecahkan melalui model ini. Walaupun demikian H.A.R Tilaar (2002:32), mengingatkan bahwa model akar rumput ini merupakan model yang idealistis, tetapi bukan tanpa "bahaya". Ia mensinyalir bahwa suatu bangsa yang besar dan dalam area geografis yang begitu luas dan beragam, model ini akan mengandung unsur-unsur egosisme atau kelompok. Masing-masing kelompok atau suku atau daerah akan terkurung dan terhimpit dalam kelompoknya sendiri. Sikap seperti ini lama-kelamaan akan melunturkan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Lebih jauh, ditegaskan oleh H.A.R Tilaar (2002:32), bahwa "model akar rumput dapat kehilangan orientasinya apabila sentimen primordialisme berkembang tanpa kendali, dan akan menjadi ancaman bagi Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Pendapat tersebut perlu diantisipasi, karena terbuka peluang menjadi kenyataan tetap ada, namun demikian dapat dipastikan tidak akan terjadi apabila dalam mengembangkan kurikulum tetap berpijak atau mengacu pada kerangka pencapaian tujuan nasional yang telah digariskan dan "rambu-rambu" pendidikan nasional berupa standar nasional pendidikan. Dalam kaitannya dengan kekhawatiran H.A.R Tilaar di atas, sebagai langkah antisipasi Nuril Huda (1999:27), telah mengingatkan bahwa fungsi koordinasi dan pengendalian pemerintah pusat masih perlu diperkuat, sehingga penyimpangan yang dapat mengancam integritas bangsa dapat dihindarkan.

KURIKULUM MUATAN LOKAL SEBAGAI IMPLEMENTASI DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Pengenalan dan pemahaman kondisi dan potensi local tersebut penting sedini mungkin dilakukan melalui kurikulum di sekolah agar peserta didik lebih mengenal dan memahami lingkungannya. Segala keputusan yang diambil berkaitan dengan penyusunan pengembangannya diserahkan kepada satuan pendidikan atau kepada daerah. Inilah sesungguhnya yang menjadi inti dari tindak lanjut atau implementasi dari pengelolaan pendidikan yang menganut sistem desentralisasi dalam pendidikan. Pada sistem ini, sekolah atau daerah memiliki "*full authority and responsibility*" dalam memilih dan menetapkan kurikulum beserta perangkatnya sesuai dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan dalam kerangka tujuan pendidikan nasional. Sistem pengembangan yang sentralistik tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi secara ketat. Karena pengembangan kurikulum yang demikian tidak terlepas dari sejumlah kerugian. Berkaitan dengan pikiran itu Aziz Wahab (1990:34), mengemukakan; sentralisasi yang begini ekstrim cenderung melumpuhkan inisiatif para guru, murid dan pengawas dan membuat mereka selamanya mengharap bimbingan dari Jakarta, namun nyatanya bimbingan itu tidak efisien dan efektif. Untuk itu perlu adanya pengkajian secara cermat dan mendalam melalui penelitian tentang pengembangan kurikulum yang berwawasan muatan lokal. Menurut Mohammad Fachri Gafar (1990), kehadiran kurikulum muatan lokal mempunyai makna, paling tidak ditinjau dari tiga dimensi, yakni; dimensi isi kurikulum, peserta didik dan kemanfaatan kurikulum. Ditinjau dari dimensi isi kurikulum, maka kehadiran kurikulum muatan lokal merupakan upaya untuk memfungsikan berbagai potensi daerah menjadi bahan pelajaran. Dari dimensi peserta didik, maka kurikulum muatan lokal menjadikan mereka merasa satu dengan lingkungannya. Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan tenaga terdidik yang memiliki rasa kewajiban moral yang tinggi terhadap lingkungannya. Selain itu, dari dimensi kemanfaatan kurikulum adalah akan mendorong terbinanya kemandirian dalam memilih alternatif terbaik untuk memecahkan masalah setempat, menjawab tuntutan nasional bahkan tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Tentang kurikulum muatan local ini, dalam Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, ditegaskan bahwa kurikulum muatan lokal di sini tidak lagi sekedar upaya mengintegrasikan potensi daerah ke dalam mata

pelajaran yang sudah ada, melainkan merupakan program tersendiri di luar kurikulum yang bermuatan nasional. Secara umum muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan dan pemahaman yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku di daerahnya dan potensi daerahnya untuk mendukung kelangsungan kehidupannya, kelangsungan pembangunan daerah serta kelangsungan pembangunan nasional. Depdikbud (1987: 4), mengemukakan bahwa kurikulum muatan lokal bertujuan agar: (1) bahan pengajaran akan lebih mudah diserap oleh peserta didik; (2) sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan; (3) peserta didik lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya; (4) peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya; (5) peserta didik dapat menolong orangtuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya; (6) peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya; (7) peserta didik menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Lebih lanjut menurut E. Mulyasa (2007: 274), secara khusus muatan lokal bertujuan agar peserta didik: (1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; (3) memiliki sikap dan perlakuan yang selaras dengan nilai-nilai /aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Bertitik tolak dari tujuan, dapat disimpulkan bahwa kurikulum muatan lokal pada hakikatnya adalah untuk menjembatani peserta didik dengan lingkungannya melalui pengenalan dan pemahaman sampai dengan pemberian keterampilan fungsional. Keterampilan fungsional adalah keterampilan yang berguna untuk memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Di samping itu, dengan bekal keterampilan fungsional tersebut peserta didik dapat menolong orang tuanya, menolong masyarakat dan mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya pada saat ini dan masa yang akan datang. Untuk mewujudkan itu, diperlukan adanya pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah atau sekolah untuk menyusun kurikulumnya. Kesempatan dan keleluasaan yang diberikan ini tentu saja tidak mengurangi kurikulum yang bermuatan nasional yang telah ditentukan dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan. Selanjutnya menurut H.A.R Tilaar (2002), dengan muatan lokal diharapkan dapat mengembangkan sumberdaya alam dan tenaga manusia yang terdapat di daerah setempat serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah. Namun demikian, yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan yang cermat serta hati-hati adalah dengan adanya kurikulum muatan lokal bukanlah

bertujuan agar peserta didik terjerat dalam lingkungan semata. Selanjutnya muncul pertanyaan yang mendasar yaitu: Potensi-potensi apa yang dapat dikembangkan di daerah atau pada satuan pendidikan? Pertanyaan ini mengarah kepada ruang lingkup kurikulum muatan lokal.

Bertitik tolak dari konsep dan pengertian sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka ruang lingkup muatan lokal tersebut meliputi; kondisi lingkungan alam, lingkungan sosial dan budaya serta ekonomi. Berkaitan dengan ruang lingkup muatan lokal ini, Anwas Iskandar (1988), mengidentifikasi sejumlah unsur yang dapat dijadikan muatan lokal, seperti; benda alam, baik benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat langsung oleh indra, proses dan peristiwa-peristiwa lokal, bahasa daerah, kebiasaan-kebiasaan, keterampilan khas daerah, sistem kehidupan dan sebagainya.

PENUTUP

Penyelengraan pendidikan yang merata, berkualitas dan relevan dari sentralistik menuju desentralistik melalui pengembangan kurikulum sudah perlu kembali ditingkatkan semangatnya dalam rangka, mengakomodir kepentingan dan potensi daerah untuk mewujudkan program pendidikan maupun membangun sumberdaya yang memiliki kearifan local. Sentralisasi yang begitu ekstrem atau begitu ketat tidak dapat dipertahankan lagi karena dapat melumpuhkan inisiatif daerah dan inisiatif guru atau siswa. Demikian juga desentralisasi yang begitu ekstrem tidak mungkin pula dikembangkan karena bias-bisa akan menimbulkan bahaya dan menimbulkan benih-benih disintegrasi bangsa dan mengancam negagara kesatuan republic Indonesia (NKRI). Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian, pengawasan dan pengontrolan dari pihak yang kompeten mutlak diperlukan.

RUJUKAN

- Anwas Iskandar. 1988. *"Muatan Lokal Sebagai Pangkal Tolak Mencerdaskan kehidupan Bangsa; Sebuah Pemikiran Awal"*. Makalah disajikan dalam Konvensi Pendidikan Nasional Indonesia. Bandung.
- Depdikbud. 1987. *Petunjuk Penerapan Muatan Lokal Kurikulum SD*. Jakarta: Depdikbud.
- E. Mulyasa. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mannheim, Karl. 1954. *Diagnosis of Our Time: Wartime Essays of a Sociologist*. London: Routledge & Kegan Paul. Ltd.
- Mohammad Ansyar. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK).
- Muhammad Fakhri Gafar. 1990. *"Implikasi Desentralisasi Pendidikan Menyongsong Abad 21"*. Bandung: Mimbar Pendidikan.
- Soenarto dan Akdon. 2004. *"Kebijakan Otonomi Daerah dalam Kerangka Desentralisasi Pendidikan"*. Makalah disajikan dalam Komvensi Nasional Pendidikan Indonesia V di Surabaya 5-9 Oktober.

- Nana Syaodih, Sumkadinata. 1988. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999. tentang Otonomi Daerah*. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009. tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007. tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Zais, Robert D. 1976. *Curriculum Principles and Foundations*. New York: Harper & Row Publisher.



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

Menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Dr. Alwen Bentri, M.Pd

SEBAGAI NARASUMBER DALAM KEGIATAN

FOCUS GROUP DISCUSSION

Yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Bekerjasama dengan Universitas Negeri Padang, Provinsi Sumatera Barat
Pada hari Kamis, tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas

T E M A:

**"Mewujudkan Sistem Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai
Implementasi Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945"**

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, 7 September 2017

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua,



Zulkifli Hasan, SE., MM.

Wakil Ketua,

H. Mahyudin, ST., MM.

Wakil Ketua,

E.E. Mangindaan, S.IP.

Wakil Ketua,

Dr. (H.C.) Oesman Sapta

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA.